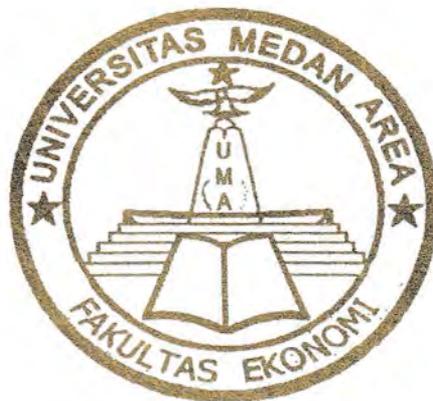


**ANALISIS PENYUSUNAN DAN REALISASI
ANGGARAN TAHUN 2004 PADA
BAPPEDA SUMUT
MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

**ANDI MAULANA
NIM : 02 833 0011**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24



Judul Skripsi : **ANALISIS PENYUSUNAN DAN REALISASI
ANGGARAN TAHUN 2004 PADA BAPPEDA
SUMUT MEDAN**

Nama Mahasiswa : **ANDI MAULANA**

N I M : 02 833 0011

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR)

Pembimbing II

(LINDA LORES SE, MSi)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
(Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR)

D e k a n



(H. SHAHRIANDY SE, MSi)

Document Accepted 29/2/24

RINGKASAN

ANDI MAULANA, ANALISIS PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2004 PADA BAPPEDA SUMUT MEDAN, (di bawah bimbingan Dra. Hj. RETNAWATI SIREGAR, sebagai Pembimbing I dan LINDA LORES SE, MSi, sebagai Pembimbing II).

Setiap perusahaan atau badan usaha mempunyai berbagai visi, misi dan tujuan dan dalam hal ini tujuan yang paling utama dari Badan ini adalah melaksanakan pembangunan daerah dengan baik dan terarah sesuai dengan dana pembangunan yang telah dianggarkan melalui perencanaan anggaran yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam rangka memenuhi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya tersebut maka hal itu tidak lepas dari peran serta dan koordinasi yang baik dari seluruh personil inti dan jajaran yang bertugas di dalam bidang pembangunan daerah dan untuk memenuhi anggaran yang telah ditetapkan maka kinerja dan koordinasi dari seluruh bidang pembangunan sangat diperlukan, untuk itu kinerja para personil inti dan jajaran badan perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipahami dan ditelaah mengenai tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dan akan

Para personil inti Badan perencanaan pembangunan daerah ini juga dapat mengukur tingkat keberhasilan bidang pembangunannya masing – masing dengan cara melihat dan mengukur realisasi pembangunan dari setiap bidang pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan bidang pembangunannya masing masing, untuk itu diperlukan adanya suatu sistem kerja yang baik dengan cara melihat tingkat kedisiplinan, ketepatan dan kecepatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing sehingga ada suatu sinkronisasi yang baik antar bagian dalam struktur organisasi, untuk itu juga diperlukan suatu evaluasi kinerja dari seluruh bagian struktur organisasi yang fungsinya dapat menjadi tolok ukur dalam melihat tingkat keberhasilan perencanaan dan realisasi pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian maupun analisis terhadap penyusunan dan realisasi anggaran tahun 2004 pada BAPPEDA SUMUT MEDAN yang telah dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BAPPEDA SUMUT telah menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan pembangunan dan ditempuh dengan berbagai tahap proses perencanaan pembangunan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
2. BAPPEDA SUMUT di dalam menyusun rencana pembangunan melalui anggaran telah menerapkan prosedur yang memadai hal ini dapat dilihat dari keterlibatan dan peran serta setiap bagian dalam struktur organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.

3. Aktivitas penyusunan anggaran berjalan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dan ketersediaan indikator kinerja kegiatan anggaran memberikan masukan terhadap pengukuran dan perbandingan anggaran.
4. Pengawasan anggaran dilakukan melalui analisis perbandingan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya dan pengawasan lain yang diperlukan.

Setelah menarik beberapa kesimpulan, akhirnya penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak penyusun anggaran harus memiliki antisipasi yang kuat dan akurat tentang perkiraan anggaran.
2. Setiap bagian dalam struktur organisasi harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing guna keberhasilan pembangunan.
3. Tingkat ketepatan dan keakuratan anggaran harus ditingkatkan sehingga penyimpangan anggaran dapat diminimalisasikan.
4. Melakukan analisis yang lebih kritis terhadap penyimpangan anggaran yang jumlahnya cukup signifikan dan meminta pertanggungjawaban dari setiap bagian struktur organisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya masing – masing.
5. Kepada setiap bagian dalam struktur organisasi agar tetap dapat mempertahankan

keharmonisan hubungan kerja dan terus meningkatkan disiplin kerja serta

UNIVERSITAS MEDAN AREA
menjaga komitmen dan semangat kerja.

Document Accepted 29/2/24

© Hak Cipta Ditujukan kepada Masyarakat

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/2/24

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| RINGKASAN | i |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Alasan Pemilihan Judul | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 2 |
| C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian | 2 |
| D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data | 3 |
| E. Metode Analisis | 4 |
| BAB II : LANDASAN TEORITIS | 6 |
| A. Pengertian dan Manfaat Anggaran | 6 |
| B. Prosedur Penyusunan Anggaran | 9 |
| C. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Pembangunan | 10 |
| D. Analisis Penyimpangan dan Tindak Lanjut | 18 |

| | Halaman |
|--|---------|
| BAB III : BAPPEDA SUMATERA UTARA | 20 |
| A. Gambaran Umum BAPPEDA | 20 |
| B. Proses Perencanaan Anggaran | 35 |
| C. Prosedur Penyusunan Anggaran | 37 |
| D. Realisasi Anggaran | 39 |
| E. Analisis Penyimpangan dan Tindak Lanjut | 63 |
| BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI | 65 |
| BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat dewasa ini memerlukan adanya suatu sarana dan prasarana yang memadai dan dapat mendukung dan memenuhi kepentingan umum. Dalam rangka memenuhi dan mendukung kepentingan umum tersebut diperlukan adanya suatu pembangunan baik pembangunan berskala nasional ataupun berskala daerah atau propinsi.

Dalam tahap awal pelaksanaan pembangunan baik pembangunan yang berskala nasional ataupun berskala daerah atau propinsi diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang jelas, nyata dan objektif baik dalam hal perencanaan jumlah taksiran anggaran yang dibutuhkan, perencanaan penyediaan anggaran hingga realisasi anggaran pembangunan yang digunakan.

Anggaran yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan tersebut dikelola dengan tujuan agar pembangunan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana jumlah taksiran anggaran dan sesuai dengan realisasinya. Dan anggaran tersebut juga bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya agar tidak ada ketimpangan pembangunan yang nantinya akan berdampak kepada tingkat kesejahteraan penduduk yang berbeda antara setiap daerah atau propinsi yang ada di Indonesia.

Memahami begitu pentingnya anggaran sebagai alat untuk pemerataan pembangunan nasional maka penulis merasa tertarik untuk mendalami bidang ini.

Objek yang menjadi penelitian adalah suatu Badan Pemerintahan Daerah yaitu BAPPEDA SUMUT (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA) yang berperan didalam perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2004 PADA BAPPEDA SUMATERA UTARA “.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan penulis pada BAPPEDA SUMUT maka ditemukan adanya masalah yang dihadapi yaitu “Apakah Penyusunan Anggaran dapat membantu ketepatan Pelaksanaan Pembangunan ? “.

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat keterbatasan waktu, biaya dan kemampuan yang ada pada penulis maka luas penelitian dibatasi hanya mengenai peranan anggaran sebagai alat keberhasilan pembangunan daerah pada BAPPEDA SUMATERA UTARA.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang perencanaan anggaran tahun 2004.
2. Untuk mengetahui tentang prosedur penyusunan anggaran tahun 2004.
3. Untuk mengetahui tentang realisasi anggaran tahun 2004.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pengetahuan dasar dalam penerapan Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Sebagai bukti bagi pihak BAPPEDA SUMUT bahwa penyusunan anggaran telah sesuai dengan prosedur.
3. Sebagai informasi kepada semua pihak tentang prosedur perencanaan dan realisasi anggaran.

D. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian Kepustakaan (Library Research) adalah Penelitian yang didasarkan pada Kepustakaan serta buku – buku, literature, tulisan ilmiah, buletin dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Data yang diperoleh adalah Data Sekunder.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian Lapangan (Field Research) adalah Penelitian yang dilakukan langsung pada objek penelitian. Data yang diperoleh adalah Data Primer.

Teknik pengumpulan Data Primer yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observation).

Pengamatan (Observation) yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung pada BAPPEDA SUMUT.

2. Wawancara (Interview).

Wawancara (Interview) yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pihak BAPPEDA SUMUT untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

E. Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan menggunakan:

1. Metode *Deskriptif*.

Metode *Deskriptif* yaitu dengan menyusun, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang ada di BAPPEDA SUMUT MEDAN.

2. Metode *Komparatif*.

Metode *Komparatif* yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan antara data teori dengan data praktek sehingga dapat diperoleh kesesuaian atau penyimpangan diantara keduanya.

Dari kedua metode analisis diatas maka penulis akan dapat mengambil suatu kesimpulan untuk selanjutnya menyusun serta memberikan saran yang kiranya berguna sebagai alternatif atas pemecahan masalah yang di teliti.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Manfaat Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Semakin kompleksnya masalah menyebabkan banyak kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang cermat. Anggaran adalah salah satu bentuk dari berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut anggaran. Berikut ini dikemukakan pengertian anggaran menurut Mulyadi sebagai berikut:

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun dan anggaran merupakan suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program”.¹

Definisi anggaran menurut M Nafarin adalah sebagai berikut:

“Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu badan atau organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu”.²

¹ Mulyadi, **Akuntansi Manajemen**, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 488.

² M Nafarin, **Penganggaran Perusahaan**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm.

Anggaran adalah rencana awal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, dan anggaran memerlukan prosedur penyusunan yang jelas dan transparan

Anggaran merupakan alat untuk mencapai tujuan, jadi anggaran bukan tujuan dan anggaran disusun berdasarkan proses dan prosedur penyusunan yang sistematis dan transparan.

2. Manfaat Anggaran

Anggaran memiliki tiga manfaat dasar yaitu:

- a. Menunjukkan jumlah dan waktu akan kebutuhan dana di masa yang akan datang.
- b. Memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan jika jumlah dalam anggaran tidak cocok dengan jumlah yang sebenarnya terjadi.
- c. Anggaran memberikan dasar evaluasi atas suatu kinerja.³

Sedangkan anggaran negara memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu periode di masa yang akan datang.
2. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah diambil pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus men dapat persetujuan DPR terlebih dahulu.
3. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah

³ Arthur J Keown, David F Scott Jr, John D Martin, J William Petty, **Financial Management – Dasar – dasar Manajemen Keuangan**, Terjemahan Chaerul D Djakman, Edisi Ketujuh, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 139.

dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya.⁴

Tujuan anggaran antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Digunakan sebagai landasan yuridis dan formal dalam mengelola anggaran.
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang didapat.
3. Merinci jenis kegiatan sehingga memudahkan pengawasan.
4. Untuk mencapai hasil atau tujuan dari apa yang telah direncanakan.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun.
6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan dan proses realisasi anggaran.

Anggaran juga mempunyai arti yang sangat penting bagi pembangunan daerah antara lain: Anggaran tersebut akan dapat diketahui perbandingannya antara proses penyusunan dengan realisasinya setelah jangka waktu tertentu.

Seperti dikemukakan oleh Bambang Riyanto:

“Keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai anggaran dan tindak lanjut terhadap anggaran akan dapat diketahui setelah jangka waktu anggaran atau setelah realisasi”⁵

⁴ Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 13.

⁵ Bambang Riyanto, **Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan**, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, DRF, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, hlm.121.

B. Prosedur Penyusunan Anggaran

Latar belakang penyusunan anggaran yang baik adalah disebabkan karena adanya perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi dan telah menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintahan yang baik, tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas juga menjadi dasar terhadap penyusunan anggaran pemerintahan di sektor publik. khususnya terhadap sistem akuntansi anggaran.

Sistem akuntansi anggaran menurut Gatot Soepriyanto dan Indra Bastian adalah:

“Sistem akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan maupun belanja”,⁶

Prosedur penyusunan anggaran menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

“Membuat rencana anggaran satuan kerja, lalu menyampaikannya kepada tim anggaran eksekutif untuk dievaluasi lalu rencana anggaran satuan kerja dikembalikan kepada unit kerja dan menurut hasil tim anggaran eksekutif perlu dilakukan revisi maka dilakukan revisi dan hasil evaluasi rancangan anggaran yang diusulkan setiap unit kerja dalam rencana anggaran satuan kerja selanjutnya oleh tim anggaran eksekutif digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan APBD, rancangan APBD pada dasarnya merupakan gabungan dari anggaran unit kerja”.⁷

⁶ Gatot Soepriyanto, Indra Bastian, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Buku Kesatu, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 5.

⁷ Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002, **Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah**, hlm. 92.

Daur anggaran Republik Indonesia ada lima tahap yaitu:

1. Penyusunan dan pengajuan rancangan anggaran (RUU-APBN) oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU – APBN dan penetapan UU APBN.
3. Pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan oleh pemerintah.
4. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawasan fungsional.
5. Pembahasan dan persetujuan DPR atas perhitungan anggaran negara (PAN) dan penetapan UU PAN.

Untuk pemerintah daerah pembagian keuangan terbagi atas dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Kekayaan milik daerah.

C. Anggaran sebagai alat Perencanaan Pembangunan

Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan, Perencanaan adalah proses dasar didalam setiap pengambilan keputusan dan juga menjadi dasar dalam rangka bagaimana cara untuk mencapai apa yang telah direncanakan tersebut,

Sebelum seorang pimpinan organisasi ataupun pimpinan sebuah badan pemerintahan dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi mereka harus

terlebih dahulu membuat rencana – rencana yang memberikan arah dan tujuan

yang akan dicapai, Dalam perencanaan seorang pimpinan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

Berikut ini dikemukakan pengertian perencanaan menurut T. Hani Handoko:

“Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa”.⁸

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan, Setiap saat selamaproses implementasi dan pengawasan rencana – rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna, Perencanaan kembali kadang – kadang dapat menjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir, oleh karena itu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru dengan secepat mungkin.

Empat dasar tahap perencanaan:

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
2. Merumuskan keadaan saat ini.

⁸ T. Hani Handoko, **Manajemen**, Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE, Yogyakarta,

3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Ad. 1. Menetapkan tujuan dan serangkaian kegiatan.

Perencanaan dimulai dengan keputusan – keputusan tentang keinginan atau kebutuhan kelompok kerja, tanpa rumusan dan tujuan yang jelas maka penggunaan sumber daya yang ada akan tidak dapat efektif.

Ad. 2. Merumuskan keadaan saat ini.

Pemahaman akan posisi dan tujuan yang hendak dicapai atau cara untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.

Ad. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan .

Segala kekuatan dan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan suatu badan atau organisasi dalam mencapai tujuan oleh karena itu perlu diketahui faktor – faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu dalam usaha pencapaian tujuan.

Ad. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian

Tujuan.

Tahap terakhir dalam proses perencanaan adalah pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif – alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang

Para perencana tidak akan dapat mengendalikan waktu yang akan datang tetapi mereka seharusnya berusaha untuk mengidentifikasi dan menghindarkan kegiatan – kegiatan sekarang yang kurang berguna dan hasil – hasilnya dapat diperkirakan dapat mempengaruhi waktu yang akan datang, Salah satu maksud utama dari perencanaan adalah melihat bahwa program – program dan penemuan penemuan sekarang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan di waktu yang akan datang yaitu meningkatkan pembuatan keputusan yang lebih baik, Perencanaan harus aktif, dinamis, berkesinambungan, dan kreatif.

Ada dua alasan dasar perlunya perencanaan yaitu perencanaan dilakukan untuk mencapai:

1. Protective benefits.
2. Positive benefits.⁹

Ad. 1. Protective benefits.

Protective benefits adalah pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.

Ad. 2. Positive benefits.

Positive benefits adalah bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan.

Berikut ini dikemukakan pengertian perencanaan menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004:

“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.¹⁰

Sedangkan pengertian Pembangunan Nasional menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 adalah sebagai berikut:

“Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.¹¹

Perencanaan pembangunan nasional mempunyai beberapa kriteria yaitu:

1. Visi.
2. Misi.
3. Strategi.
4. Kebijakan.
5. Program.¹²

Ad. 1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Ad. 2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ad. 3. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

¹⁰ Undang – undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004, **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**, hlm. 2.

¹¹ Undang – undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004, **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**, loc. Cit.

Ad. 4. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Ad. 5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berikut ini dikemukakan pengertian Sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004:

“Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana – rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan atau rencana kerja pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah”.¹³

Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip – prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.¹⁴

Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi:

1. Penyusunan Rencana.
2. Penetapan Rencana.
3. Pengendalian pelaksanaan rencana.
4. Evaluasi pelaksanaan rencana.¹⁵

Anggaran adalah hal yang paling utama dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, namun anggaran juga memerlukan rencana yang tepat dan terarah agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan pada waktu sebelumnya, selain itu anggaran adalah juga merupakan alat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Ketimpangan pembangunan yang terjadi merupakan akibat dari ketidaktepatan penerapan anggaran sebagai alat perencanaan pembangunan nasional, berikut ini dikemukakan oleh Tulus Tambunan mengenai beberapa sebab – sebab terjadinya ketimpangan pembangunan nasional:

“Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah,

¹⁴ Ibid., hlm. 6.

ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah”.¹⁶

Hal lain yang juga ikut mempengaruhi pertumbuhan pembangunan nasional adalah berasal dari sumber – sumber penerimaan negara yaitu:

1. Pajak.
2. Kekayaan alam.
3. Bea dan Cukai.
4. Retribusi.
5. Iuran.
6. Sumbangan.
7. Laba dari BUMN.
8. Sumber – sumber lain.¹⁷

Agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan maka anggaran sebagai alat perencanaan pembangunan harus dilaksanakan dengan terarah dan transparan dan harus juga diperlukan perencanaan yang sistematis dan jelas

¹⁶ Tulus Tambunan, **Perekonomian Indonesia**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 191.

¹⁷ Erlin Suardi, **Hukum Pajak**, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 2.

D. Analisis Penyimpangan dan Tindak lanjut

Pengertian umum dari penyimpangan adalah sesuatu hal atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Penyimpangan yang terjadi mempunyai dua sifat yaitu:

1. Menguntungkan.
2. Merugikan atau kurang dari apa yang telah direncanakan.

Kemungkinan yang paling besar terhadap adanya penyimpangan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar atau tujuan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
2. Ketidakmampuan untuk memprediksi akan kebutuhan anggaran di masa yang akan datang.
3. Terjadinya penyelewengan atau pemborosan yang dilakukan oleh pelaksana kerja anggaran.

Hal yang pertama sekali harus dilakukan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak ada penyimpangan terhadap anggaran adalah dengan melakukan analisis perbandingan antara perencanaan awal anggaran dengan realisasi anggaran, setelah itu akan dapat diketahui apakah anggaran yang telah direncanakan mengalami penyimpangan atau tidak mengalami penyimpangan.

Dari hasil perbandingan itu maka akan dapat diketahui bahwa hasil perencanaan anggaran surplus atau defisit, dan jika perencanaan anggaran mencukupi untuk proses pembangunan atau bahkan mengalami surplus hal ini mengindikasikan

bahwa proses perencanaan, penyusunan dan realisasi anggaran telah diterapkan secara baik dan terencana.

Dari hasil pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak BAPPEDA SUMATERA UTARA maka dalam hal ini pihak BAPPEDA SUMUT menggunakan laporan indikator kinerja kegiatan perencanaan dan realisasi anggaran BAPPEDA SUMUT sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam rangka pembangunan daerah.



BAB III

BAPPEDA SUMUT

A. Gambaran Umum BAPPEDA SUMUT

1. Sejarah Singkat BAPPEDA SUMUT

a. Periode Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Setelah Pemerintahan orde lama digantikan oleh pemerintahan orde baru yang secara kongkrit berusaha meningkatkan pembangunan daerah agar kesejahteraan rakyat lebih diutamakan sesuai dengan amanat penderitaan rakyat, maka pemerintah melihat pentingnya suatu lembaga yang dapat menyusun program – program pembangunan yang menyeluruh dengan menitikberatkan pembangunan terutama pembangunan prasarana umum seperti pembangunan jalan, jembatan, dan prasarana pertanian rakyat.

Untuk menyusun program – program pembangunan nasional maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di pusat, BAPPEDA Tingkat I Penyusun Suplemen perencanaan Nasional di Tingkat Propinsi dan BAPPEDA Tingkat II Penyusun Komplementer di Tingkat Kabupaten atau Kotamadya.

Untuk itu pada tahun 1963 di Propinsi Sumatera Utara dibentuk suatu Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BKPDSU) yang langsung diketuai oleh Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara

dan Sekretaris P. R Telaubanua yang merupakan Badan yang mengkoordinir pembangunan di daerah Sumatera Utara dan kemudian BKPDSU diganti menjadi BAKODASU (Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Sumatera Utara) yang diketuai langsung oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Ketua Harian Residen P. R Telaubanua dan Sekretaris Sutan Sitompul kemudian BAKODASU diganti namanya menjadi BAKOPDASU (Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara) yang merupakan badan pemerintahan yang pertama kali yang mengkoordinir perencanaan pembangunan di daerah Sumatera Utara dengan Ketua oleh Ir. M Sipahutar dan Sekretaris oleh Netap Bukit, Badan Periode ini telah disusun draft Repelita I Propinsi Sumatera Utara.

BAKOPDASU (Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara) berperan sebagai lembaga yang pertama kali menangani masalah – masalah yang menyangkut program pembangunan di daerah Sumatera Utara dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1974 (PELITA I). Pada periode ini telah diberlakukan Inpres (Instruksi Presiden) Tingkat II yang menyangkut program pembangunan jalan dan jembatan di Daerah Tingkat II se Sumatera Utara.

b. Periode Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1974

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No 15 Tahun 1974 tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA) yang disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 142 Tahun 1974 tentang susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA, maka melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 43 / XXIV / GSU tanggal 18 November 1974 ditetapkan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAPPEDASU), dan Ketua BAPPEDASU yang pertama adalah Bapak Prof. DR. S Hadibroto, MA dengan Wakil Ketua Drs. R. Perangin – angin yang juga merangkap sebagai Kepala Biro Pembangunan.

Sekretariat dan bidang – bidang BAPPEDASU yang terdiri dari Bidang Fisik, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Pengendalian dan membawahi bagian – bagian yang telah dapat melaksanakan tugasnya antara lain dalam penyusunan Repelita II Sumatera Utara, penyusunan RAPBN setiap tahunnya dengan bekerjasama dengan Biro Keuangan dan Pembangunan.

Fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk sementara hanya diatur untuk Tingkat I sedangkan penyusunan rencana pembangunan Daerah Tingkat II belum diatur walaupun kepentingan Daerah Tingkat II telah dapat dirasakan, oleh karena itu beberapa Daerah Tingkat II melalui keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan telah membentuk Badan Perencanaan Daerah Tingkat II seperti: Deli Serdang, Labuhan Batu, Simalungun, Langkat dan Asahan, namun demikian pembentukan BAPPEDA Tingkat II ini belum mempunyai dasar hukum yang kuat sebagaimana pembentukan BAPPEDA Tingkat I.

c. Periode Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentang pembentukan pembangunan daerah dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan yaitu dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah menjadi perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap Keppres No. 15 Tahun 1974, dan selanjutnya atas dasar Keppres No. 27 Tahun 1980 Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan No. 185 Tahun 1980 menetapkan Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II.

Sesuai dengan keyentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tersebut diatas maka pembentukan BAPPEDA Tingkat I Sumatera Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (PERDASU) No. 2 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Daerah Tingkat I Sumatera Utara disahkan Menteri Dalam Negeri dengan No. 061. 134. 2281 tanggal 20 april tahun 1981. susunan organisasi BAPPEDA Tingkat I Sumatera Utara pada periode tersebut berdasarkan kepada PERDASU No. 2 Tahun 1981 tersebut diatas.

d. Periode Keputusan Menteri dalam negeri No. 50 Tahun 2000

Sesuai dengan era reformasi dan otonomi daerah yang mengacu kepada Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah No. 50 tahun 2000 tentang pedoman organisasi dan tata kerja perangkat daerah propinsi maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 4 tahun 2001 tentang lembaga teknis daerah propinsi sumatera utara, tugas pokok dan fungsi pembentukan BAPPEDA propinsi sumatera utara disahkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061. 1 – 433. K / Tahun 2002.

Dengan terbitnya keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061. 1 – 433. K / Tahun 2002 tanggal 18 Juni 2002 maka tugas, fungsi dan tata kerja BAPPEDASU telah berubah, perubahan susunan organisasi dan tata kerja BAPPEDA Tingkat I Sumatera Utara antara lain:
BAPPEDA Tingkat I Propinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua berubah menjadi BAPPEDA Propinsi Sumatera Utara dan dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala.

1) Kedudukan BAPPEDASU

Kedudukan BAPPEDASU dapat diuraikan sebagai berikut:

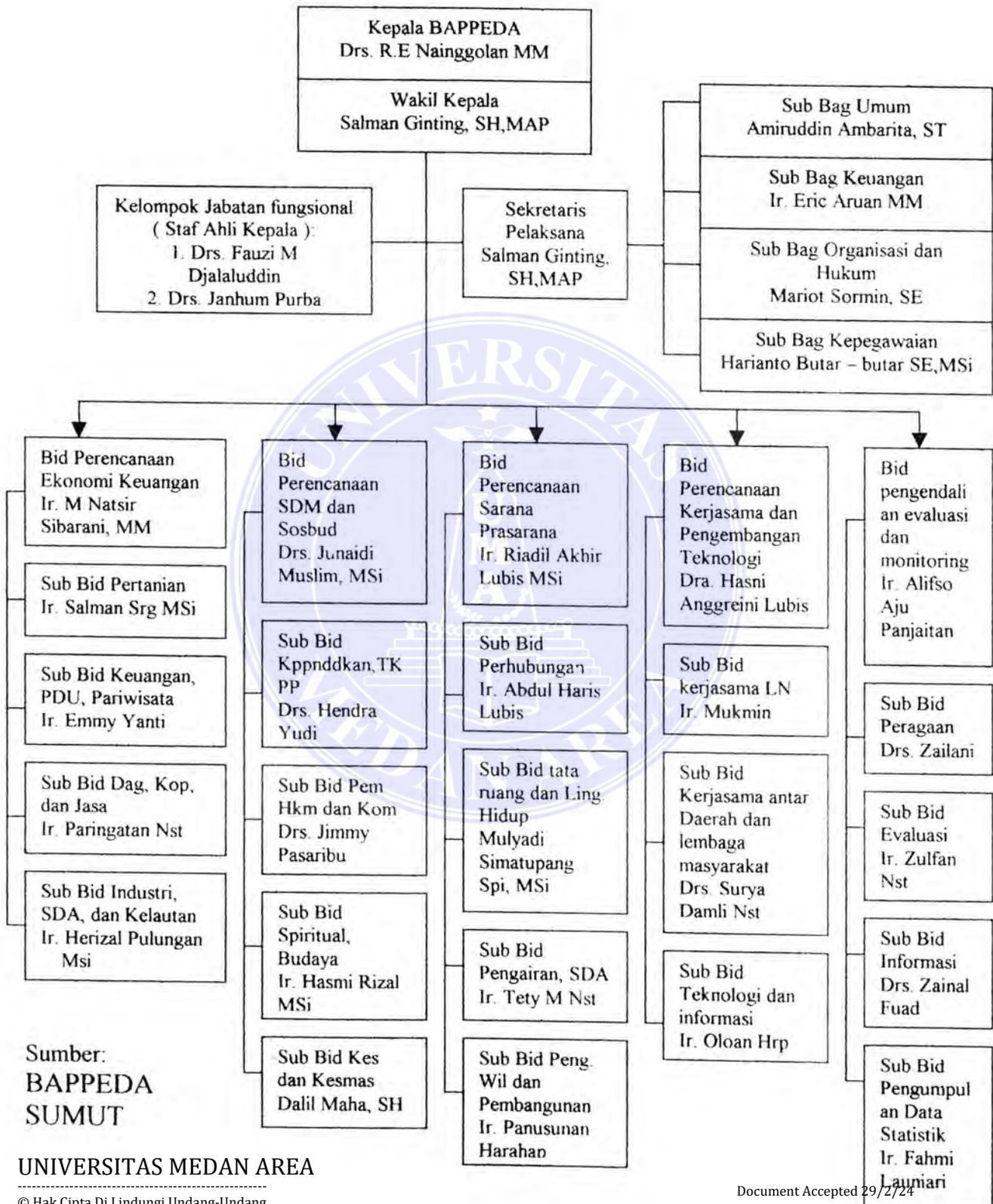
1. BAPPEDASU adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara.
2. BAPPEDASU dipimpin oleh seorang kepala.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BAPPEDASU dibantu oleh seorang

Wakil Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDASU.

2) Tugas BAPPEDASU

BAPPEDASU mempunyai tugas antara lain membantu Gubernur Sumatera Utara dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

3) Struktur Organisasi BAPPEDA SUMATERA UTARA

BAPPEDA adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk membantu Gubernur Sumatera Utara dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara serta penilaian atas pelaksanaannya. Badan ini berada dan bertanggung jawab kepada gubernur kepala daerah Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 061. 1 – 433 K Tahun 2002 dan SK Gubernur Sumatera Utara No. 061. 1 – 433 K Tahun 1980. Untuk melaksanakan tugas – tugas diatas maka diperlukan sistem organisasi dan manajemen yang sangat mantap/

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAPPEDA SUMUT) terdiri dari:

1. Kepala BAPPEDA Sumut.
2. Wakil Kepala .
3. Sekretaris dan Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Organisasi dan Hukum.
 - d. Sub Bagian Kepegawaian.
4. Staf Ahli Kepala.
5. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan yang terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pertanian.
 - b. Sub Bidang Keuangan, Pengembangan Dunia Usaha dan pariwisata.
 - c. Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan jasa.
 - d. Sub Bidang Industri, Sumber Daya Alam dan Kelautan.
6. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Sub Bidang Pemerintahan, Hukum dan Komunikasi.
 - c. Sub Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual dan Budaya.
 - d. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
7. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Perhubungan.
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - c. Sub Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air.
 - d. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Pembangunan.
8. Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Teknologi, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri.
 - b. Sub Bidang Kerjasama antar Daerah dan Lembaga masyarakat.
 - c. Sub Bidang Teknologi dan Informasi.
9. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Peragaan.
- b. Sub Bidang Evaluasi.
- c. Sub Bidang Informasi.
- d. Sub Bidang Pengumpulan data statistik.

4) Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

a) Tugas dan Fungsi

1) KEPALA BAPPEDA:

1. Kepala BAPPEDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Kepala BAPPEDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah (PROPEDA), Rencana pembangunan tahunan daerah (REPETADA) dan Anggaran belanja pembangunan dan pembuatan kajian atau studi pembangunan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
 - b. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi perencanaan pembangunan dengan daerah kabupaten atau kota serta koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah untuk menyiapkan bahan dan konsep pelaksanaan program selanjutnya sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.
 - e. Penyusunan konsep kebijakan gubernur tentang standar atau ketentuan teknis perencanaan dan kebijakan perencanaan lainnya serta pengendalian atas pelaksanaannya.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - g. Pemberian masukan dan saran yang perlu kepada gubernur dan sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada gubernur melalui sekretaris daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud diatas maka Kepala BAPPEDA dibantu oleh:
- a. Wakil Kepala.
 - b. Sekretaris.

- c. Kepala Sub Bagian Umum.
- d. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- e. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum.
- f. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
- g. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Keuangan.
- h. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya.
- i. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.
- j. Kepala Bidang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Teknologi.

2) Wakil Kepala BAPPEDA:

1. Wakil Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka Wakil Kepala menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasian, penyempurnaan, penyusunan dan penerapan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten atau kota di bidang perencanaan dan standar pelaksanaan tugas – tugas BAPPEDA, perencanaan kegiatan serta kebutuhan peningkatan kapasitas personal, kinerja, disiplin pegawai dan sistem kerja.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi pembangunan dari masing – masing bidang pada BAPPEDA, pengkoordinasian, pengumpulan data

data pembangunan dan pengkoordinasian penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala BAPPEDA apabila Kepala BAPPEDA berhalangan sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- e. Pemberian masukan dan saran yang perlu kepada Kepala BAPPEDA sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala BAPPEDA sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3) Sekretaris BAPPEDA:

1. Sekretaris BAPPEDA mempunyai tugas Kepala Badan di bidang Umum, Keuangan, Organisasi, dan Kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka Sekretaris BAPPEDA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Perencanaan kebutuhan internal dan kegiatan administratif BAPPEDA serta pengelolaan dan pengendalian penggunaannya.

- b. Perencanaan, pengelolaan dan pengurusan pertanggungjawaban keuangan dan pengajuan usul pimpinan proyek pada BAPPEDA sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - c. Perencanaan pengelolaan dan pendaya gunaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - d. Perencanaan dan peningkatan sistem kerja serta pengelolaan produk hukum BAPPEDA sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA dan Wakil Kepala BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - f. Pemberian masukan dan saran yang perlu kepada Kepala BAPPEDA dan kepada Wakil Kepala BAPPEDA sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala BAPPEDA melalui Wakil Kepala BAPPEDA sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas maka Sekretaris BAPPEDA dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bagian Umum.
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
 - c. Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum.

d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian.

4) Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana

1. Kepala Bidang perencanaan sarana dan prasarana mempunyai tugas membantu kepala badan di bidang perencanaan sarana dan prasarana.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka kepala bidang perencanaan sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian, penyempurnaan dan penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan standar pelaksanaan peningkatan kapasitas perencanaan di bidang penataan ruang dan pemukiman, jalan dan jembatan, sumber daya air dan penggunaan sumber daya alam lainnya, pengembangan lingkungan hidup dan wilayah pembangunan serta sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaannya

b. Pengkoordinasian, perumusan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan serta melakukan kajian dan studi pembangunan di bidang penataan ruang dan pemukiman, jalan dan jembatan, sumber daya air dan penggunaan sumber daya alam lainnya, pengembangan lingkungan hidup dan wilayah pembangunan sesuai standar yang ditetapkan.

c. Pelaksanaan evaluasi hasil – hasil pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan dan wakil kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.
 - e. Pemberian masukan yang perlu kepada kepala badan dan wakil kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala badan melalui wakil kepala badan sesuai standar yang diterapkan.
3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas kepala bidang perencanaan sarana dan prasarana dibantu oleh:
- a. Kepala Sub Bidang Perhubungan.
 - b. Kepala Sub Bidang Tata ruang dan Lingkungan Hidup.
 - c. Kepala Sub Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air.
 - d. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Pembangunan.

B. Proses Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Perencanaan jangka panjang (lima tahunan).
2. Perencanaan jangka menengah (tiga tahunan).
3. Perencanaan jangka pendek (satu tahunan).

Penganggaran daerah termasuk kategori perencanaan jangka pendek yang merupakan bagian dari perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Proses Perencanaan anggaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD menyusun dan menyepakati Arah dan Kebijakan Umum APBD, penyusunan arah dan kebijakan umum ini berpedoman pada rencana strategi pembangunan daerah, penjangkaran aspirasi masyarakat, laporan kinerja tahun anggaran sebelumnya, pokok – pokok pikiran DPRD dan kebijakan keuangan daerah, proses penjangkaran aspirasi masyarakat dimulai pada bulan mei dan kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD mengenai arah dan kebijakan umum APBD dilaksanakan pada bulan juni hingga bulan juli.
2. Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD maka pemerintah daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD, proses penyusunan strategi dan prioritas APBD ini dilaksanakan pada bulan juli hingga bulan agustus (termasuk konfirmasi rumusan strategi dan prioritas APBD kepada DPRD).
3. Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan anggaran unit kerja dan disampaikan kepada setiap unit kerja eebagai dasar penyusunan rencana anggaran unit kerja, proses tersebut dilaksanakan pada bulan agustus hingga september.
4. Penyusunan rencana anggaran satuan kerja yang bermaterikan pernyataan visi, misi, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran unit kerja, dan penyusunan rencana anggaran satuan unit kerja ini dituangkan dalam rencana anggaran satuan unit kerja, pengajuan rencana anggaran satuan unit kerja ini

diajukan kepada tim anggaran eksekutif, evaluasi rencana anggaran satuan unit kerja dan penyusunan rancangan APBD dilaksanakan pada bulan september hingga oktober.

5. Proses perencanaan program unit kerja, proses perencanaan kegiatan unit kerja, proses kegiatan unit kerja, proses perencanaan anggaran unit kerja dan penilaian atas usulan anggaran unit kerja, seluruh proses ini dilakukan pada bulan september hingga bulan oktober.
6. Penyusunan dan pengajuan rancangan APBD kepada DPRD dan pembahasan rancangan APBD antara tim anggaran eksekutif dengan penilaian anggaran legislatif dilaksanakan pada bulan oktober hingga november.
7. Penyampaian rancangan APBD pada sidang paripurna DPRD dan penetapan rancangan APBD menjadi APBD dilaksanakan pada bulan Desember.

C. Prosedur Penyusunan Anggaran

Prosedur penyusunan APBD yang mencakup anggaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan arah dan kebijakan umum Anggaran.

Arah dan Kebijakan umum anggaran disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui dengar pendapat, turun lapangan, dialog interaktif, kotak saran, kotak pos, web site, inspeksi mendadak, dan media massa.

2. Menentukan strategi dan prioritas anggaran.

Strategi dan Prioritas anggaran dilakukan dengan cara melakukan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana,

3. Menentukan rencana anggaran satuan kerja yang mencakup:

- a. Visi, misi, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran unit kerja.
- b. Program dan kegiatan unit kerja.
- c. Pancangan anggaran unit kerja.

Penyusunan Rancangan anggaran satuan unit kerja disusun dalam suatu formulir yang digunakan untuk memuat rancangan anggaran setiap unit kerja.

4. Menentukan Rancangan anggaran.

Penentuan rancangan anggaran disusun dengan cara menetapkan alokasi anggaran yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

5. Menetapkan anggaran pembangunan dan anggaran daerah.

Rencana anggaran satuan kerja yang memuat anggaran unit kerja disampaikan kepada tim anggaran eksekutif untuk dievaluasi dan rencana anggaran satuan kerja dapat dikembalikan kepada unit kerja hal ini dapat dilakukan jika menurut hasil evaluasi tim anggaran eksekutif perlu dilakukan revisi, perubahan atau penyempurnaan.

Hasil evaluasi rancangan anggaran yang diusulkan setiap unit kerja dalam rencana anggaran satuan kerja selanjutnya oleh tim anggaran eksekutif digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.

D. Realisasi Anggaran

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Daerah.
2. Sub Bidang : Pembangunan Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Program : Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah.
4. Kegiatan : Peningkatan Publikasi Data Hasil Pembangunan Propinsi Sumatera Utara.
5. Kode Rekening : 2. 01. 06. 2. 02. 002.
6. Dana : Rp 200 000 000

| No | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|----|---|---|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| | Pembuatan Buku Selayang Pandang Propinsi Sumatera Utara | | |
| 1 | Masukan atau input: Pembuatan Buku Selayang Pandang Prop. Sumatera Utara: - Pembuatan Buku Profil. - Visual atau VCD Selayang Pandang. | Rp 200 000 000 | Rp 194 970 000 |
| 2 | Keluaran atau Output: - Buku Selayang Pandang atau Buku Profil. - VCD Selayang Pandang dan Master DVD. - Buku Profil SUMUT. | - 1200 Eksemplar - 50 Keping dan 1 Keping. - 400 Buku. | - 1200 Eksemplar. - 50 Keping dan 1 Keping. - 400 Buku. |
| 3 | Hasil atau result: Bahan Informasi Pembangunan. | Informasi pembangunan sumatera utara dalam bentuk buku dan VCD. | Adanya bahan informasi dalam bentuk buku dan VCD. |
| 4 | Manfaat atau benefit: Terpublikasinya gambaran umum yang dapat dikembangkan daerah. | Tersedianya penyebaran informasi pemangunan sumatera utara. | Tersedianya upaya penyebaran informasi pembangunan sumatera utara. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: | Menarik minat | Menarik minat |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

| | | |
|---|--|--|
| Tersebar nya media informasi yang disajikan dalam mendukung pembangunan daerah. | investor untuk mendukung pembangunan daerah sumut. | investor untuk mendukung pembangunan daerah sumut. |
|---|--|--|

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Daerah.
2. Sub Bidang : Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Program : Pengembangan Kapasitas Perencanaan Daerah.
4. Kegiatan : Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara.
5. Kode Rekening : 2. 01. 06. 2. 002.
6. Dana : Rp 500 000 000.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|--|---|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau Input: Penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2003. | Rp 500 000 000 | Rp 493 847 375 |
| 2 | Keluaran atau Output: - CD LPJ Gubsu akhir tahun anggaran 2003. - Buku LPJ. - Nota Jawaban. - Pidato pertanggungjawaban. | - 1 buah. - 185 Buku. - 185 Buku. - 185 Buku. | - 1 Buah. - 185 Buku. - 185 Buku. - 185 Buku. |
| 3 | Hasil atau result: Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2003 kepada DPRD Prosu dalam wujud CD dan Buku. | Tersimpan nya data pertanggungjawaban gubernur akhir tahun anggaran 2003 berdasarkan tolok ukur renstra. | Tersedianya data pertanggungjawaban Gubsu akhir tahun anggaran 2003 berdasarkan tolok ukur renstra. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: - untuk melaksanakan PP No. 108 tahun 2000 pasal 2 tentang pertanggungjawaban Gubsu. - sebagai bahan dokumen bagi pimpinan maupun pihak lainnya bagi yang memerlukan di masa | - Terlaksananya prosedur penyampaian laporan pertanggungjawaban pada DPRD sumut. - sesuai pedoman | Dilaksanakannya laporan pertanggungjawaban Gubsu akhir tahun anggaran 2003 kepada DPRD sumut dengan baik. |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

| | | | |
|---|--|--|--|
| | yang akan datang. | pimpinan di masa yang akan datang maupun pihak yang lainnya. | |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Melaksanakan pemerintahan sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. | Sistem pemerintahan berjalan dengan baik. | Pelaksana pemerintahan berjalan dengan baik. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Daerah.
2. Program : Kapasitas Perencanaan Daerah.
3. Kegiatan : Pengendalian dan Monitoring proyek – proyek Pembangunan di propinsi sumatera utara.
4. Kode Rekening : 2. 01. 06. 2. 022. 002.
5. Dana : Rp 100 000 000.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|---|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| | Peningkatan fungsi perencanaan pembangunan daerah sumtera utara. | | |
| 1 | Masukan atau input: - Dana: pemantauan dan pengendalian proyek – proyek pembangunan daerah Propsi. | Rp 100 000 000 | Rp 91 004 000 |
| 2 | Keluaran atau Output: - pemantauan proyek proyek pembangunan ke daerah kabupaten dan kota. - Rapat konsolidasi proyek – proyek pembangunan per triwulan. - Rapat koordinasi ke pusat (BAPPENAS) | - Buku laporan hasil konsolidasi pelaksanaan proyek – proyek pembangunan per triwulan 13 eksemplar. - Alokasi dana 28 eksemplar. | - Buku laporan hasil konsolidasi dari pelaksanaan proyek – proyek pembangunan (APBN) 13 eksemplar. |
| 3 | Hasil atau result: - Dilaksanakan Kep. Menkeu No. 102/MK/2002 dan Kep. Menneg PPN/Ketua BAPPENAS No. 292/M.PPN/09/2002, SK Gubsu No. | - Terlaksananya mekanisme sistem pemantauan dan pelaporan | - Dilaksanakannya pemantauan dan pelaporan proyek – proyek pembangunan |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

| | | | |
|---|---|---|--|
| | 903/484.K/2004 bulan desember 2004 tentang juknis pelaksanaan kegiatan APBD TA. 2004. | pelaksanaan proyek pembangunan di sumut secara efektif. | (APBD) di sumut secara efektif. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Adanya koordinasi dan teridentifikasinya permasalahan – permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek – proyek pembangunan di Sumut. | Terkoordinasinya dan teratasinya permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaan proyek – proyek pembangunan di Sumut. | Terkoordinasinya dan teratasinya permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaan proyek – proyek pembangunan di Sumut. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Terlaksananya proyek proyek pembangunan di Sumatera utara sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. | Dengan terkoordinasinya pelaksanaan proyek – proyek pembangunan di Sumatera utara sasaran atau target tercapai dan lebih berhasil guna. | Sasaran dan target pelaksanaan proyek – proyek pembangunan tercapai. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pelayanan Publik.
2. Sub Bidang : Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Politik.
4. Kegiatan : Penyusunan LAKIP Instansi BAPPEDA Propsu.
5. Kode Rekening : 2. 01. 06. 2. 02. 002.
6. Dana : Rp 25 000 000

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|---|-------------------|---------------|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau Input: Dana | Rp 25 000 000 | Rp 25 000 000 |
| 2 | Keluaran atau Output: Penyusunan LAKIP BAPPEDASU | 35 Buku | 35 Buku |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

| | | | |
|---|--|-------|-------|
| 3 | Hasil atau Result: Tersusunnya akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan BAPPEDASU | 100 % | 100 % |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Mengetahui keberhasilan dan kegagalan instansi. | 100 % | 100 % |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Peningkatan kinerja instansi pemerintah. | 100 % | 100 % |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Daerah.
2. Sub Bidang : Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Program : Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum.
4. Kegiatan : Peningkatan Perencanaan mendukung perencanaan kerjasama daerah, propinsi, kabupaten atau kota dan lembaga masyarakat.
5. Dana : Rp 250 000 000.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|----------------------|---|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Pembinaan kerjasama antar daerah. | Rp 250 000 000 | Rp 208 148 875 |
| 2 | Keluaran atau output: - Rapat koordinasi program pembangunan terhadap infrastruktur prasarana. - Konsultasi ke jakarta dalam rangka pembinaan forum kerjasama dan lintas masyarakat. | - 4 Kali - 2 Kali | - Medan, Binjai Deli Serdang 2 Kali - 2 Kali |
| 3 | Hasil atau Result: Terciptanya koordinasi perencanaan pembangunan antar propinsi, kabupaten atau kota. | Propinsi (4 Prop) | - Pendirian P.T. Sumut Promotion Center. - Pengembangan Sumut Online. - Pendirian Sumatera |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | | <p>Shipping Line.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendirian Sumatera Airline. - Rencana pembangunan jalan sejajar medan – binjai dan pembangunan jembatan tanjung selamat. - Beroperasinya Sutera – 1. |
| 4 | <p>Manfaat atau Benefit:</p> <p>Terbinanya hubungan kerjasama aparat kabupaten atau kota dalam rangka peningkatan infrastruktur prasarana transportasi darat dan udara.</p> | <p>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di kawasan medan, binjai, deli serdang dan kawasan pantai barat dan hasil – hasil rakorgub se sumatera.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Disepakatinya pembangunan jalan sejajar kampung lalang antara pemerintah kab. Deli serdang, kota medan dan binjai. - Telah dibiayai penerbangan medan gunung sitoli, pinangSORI, aek godang, dan sibolangit. - Beroperasinya sistem informasi terpadu antar propinsi di sumatera. |
| 5 | <p>Sasaran atau Dampak:</p> <p>Pengembangan lebih terarah dalam rangka peningkatan infrastruktur prasarana transportasi darat dan udara.</p> | <p>Secara bertahap masalah transportasi dapat diatasi.</p> | <p>Beroperasinya penerbangan Sutera – 1 yang membuka keterisolasian daerah, khususnya pantai barat.</p> |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Daerah.
 2. Sub Bidang : Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
 3. Program : Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
 4. Kegiatan : Peningkatan Program Kerjasama Luar negeri.
 5. Kode Rekening : 2. 01. 06.
 6. Dana : Rp 300 000 000

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|--|---|
| | | Rencana | Realisasi |
| | Peningkatan program kerjasama luar negeri. | | |
| 1 | Hasil atau input: Kerjasama dengan luar negeri. | Rp 300 000 000 | Rp 201 333 585 |
| 2 | Keluaran atau Output: Pembinaan kerjasama luar negeri. | Rapat koordinasi, agreement dan kerjasama. | Terhimpunnya laporan hasil rapat koordinasi untuk kegiatan kerjasama luar negeri. |
| 3 | Hasil atau Result: Adanya informasi dan kesepakatan tentang upaya peningkatan kerjasam luar negeri. | Bahan masukan dalam rapat koordinasi dan konsultasi kerjasama luar negeri. | Tersedianya usulan program program yang akan dikerjasamakan dari hasil pertemuan. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Mempercepat pembangunan sumatera utara. | Terbukanya peluang investasi perdagangan dari negara - negara lain. | Peluang investasi perdagangan bagi dunia usaha semakin besar. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sumatera utara. | Tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. | Peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Politik.
2. Sub Bidang : Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
3. Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan.
4. Kegiatan : Tarif Biaya Pemakaian Internet Access dan Local Link dari Indosat – Kantor PDE Propinsi Sumatera Utara selama 1 tahun.
5. Kode Rekening : 2. 01. 06.
6. Dana :Rp 270 900 000.

| No. | Ringkasan Materi | Indikator Kinerja | |
|-----|---|---|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan ata input: - Pemakaian jaringan informasi melalui internet dari Indosat – Kantor PDE Propsu dan terintegrasi ke instansi Propsu. - Up dating data BAPPEDA Propsu pada Portal website Pempropsu. | Rp 270 900 000 | Rp 257 703 500 |
| 2 | Keluaran atau Output: - Pembiayaan tarif pemakaian internet access local link dengan kecepatan akses 128 Kbps dari indosat – Kantor PDE. | - Tarif biaya = 1 tahun. - Up dating data = 1 paket. | - Pemakaian internet dengan kecepatan akses 128 Kbps selama 6 bulan. - Pemakaian internet dengan kecepatan 256 Kbps selama 6 bulan. - Data atau informasi: Pemerintahan BAPPEDA Propsu yang terkini sesuai dengan Tupoksi. |
| 3 | Hasil atau Result: - Terintegrasi jaringan informasi melalui intenetdari indosat – Kantor PDE dan instansi atau lembaga | - Tersedianya jaringan informasi melalui internet | - Online 24 jam setiap hari dari indosat – Kantor PDE Propsu |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terpublikasi informasi pemerintahan yang dapat diakses melalui www.pempropsu.go.id | <p>dengan sistem local link yang dapat diakses dengan cepat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data dan informasi terkini yang dapat ditransfer melalui website pempropsu. | <p>selama 1 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terinformasi data BAPPEDA Propsu yang terkini pada website pempropsu yang dapat diakses secara online. |
| 4 | <p>Manfaat atau Benefit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu. - Dapat menyebarkan informasi yang akurat dan terkini tentang data pemerintahan atau program pembangunan daerah. | <ul style="list-style-type: none"> - Pengiriman dan penerimaan informasi dari dan ke instansi pemerintahan semakin baik, cepat dan akurat. - Pendistribusian informasi yang diletakkan dalam satu platform (internet) yang dapat diakses selama 24 jam setiap hari. | <ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang diterima dan dikirim dapat diakses secara online melalui internet. - Layanan informasi BAPPEDA Propsu diletakkan dalam satu platform pada website pempropsu untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan kegiatan. |
| 5 | <p>Sasaran atau Dampak:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya satu sistem jaringan informasi terpadu pemerintah propinsi yang dapat diakses secara online dengan teknologi web di lingkungan internal dan eksternal. - Tersedianya data dan informasi yang akurat atau terkini sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kegiatan. | <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya hubungan antar instansi atau lembaga pemerintahan dan publik melalui teknologi informasi (IT). - Terinformasinya data program pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparat pemerintah dengan adanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi. - Mempercepat dalam proses birokrasi yang transparan. |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | daerah yang dapat dimanfaatkan instansi pemerintah maupun publik. | |
|--|--|---|--|

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Daerah.
2. Sub Bidang : Mempercepat Pembangunan Wilayah.
3. Program : Penataan Ruang.
4. Kegiatan : Rencana kerja kegiatan tim koordinasi penataan ruang daerah propinsi sesuai keputusan gubsu no. 050. 05 / 248.K / 2002 tanggal 8 mei 2002.
5. Kode Rekening : 2. 01.06.
6. Dana : Rp 249 999 975.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|--|---|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Dana. | Rp 249 999 975 | Rp 239 766 825 |
| 2 | Keluaran atau Output: Pembinaan dan evaluasi tata ruang sumatera utara. | - Penyusunan evaluasi RTRW Kabupaten atau kota terhadap Perda No. 7 tahun 2003 tentang RTRWP SU Tahun anggaran 2003 - 2018 (10 eksemplar). - Pengadaan satu unit kamera digital. - Laporan akhir kegiatan dua buah buku. | - Penyusunan evaluasi RTRW Kabupaten atau kota terhadap Perda No. 7 tahun 2003 tentang RTRWP SU tahun anggaran 2003 - 2018 (10 eksemplar). - Pengadaan satu unit kamera digital. - Laporan akhir kegiatan dua buah buku. |
| 3 | Hasil atau Result: | - Evaluasi ke | - Evaluasi ke |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

| | | | |
|---|--|--|---|
| | Koordinasi dan evaluasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang. | kabupaten atau kota se sumatera utara. - Koordinasi ke jakarta dan propinsi lain. | kabupaten atau kota se sumatera utara. - Koordinasi ke jakarta dan propinsi lain. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukan. | Perda RTRWP No. 7 tahun 2003 sebagai bahan referensi pemanfaatan ruang oleh kab/kota dan sektoral. | Terdapat peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang sesuai rencana RTRWP SU oleh kab/kota se sumatera utara. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan. | Semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang sesuai rencana yang ditetapkan 25 kab/kota. | Kab/kota dan sektoral menggunakan RTRWP untuk kepentingan rencana 25 kab/kota. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Daerah.
 2. Sub Bidang : Mempercepat Pembangunan Wilayah.
 3. Program : Penataan Ruang.
 4. Kegiatan : Rencana kerja kegiatan sosialisasi Perda No. 7 tahun 2003 tentang RTRWP tahun 2003 – 2018.
 5. Kode Rekening : 2. 01. 06.
 6 Dana : Rp 150 000 000.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|--|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Dana. | Rp 150 000 000 | Rp 142 338 000 |
| 2 | Keluaran atau Output: Pelaksanaan kegiatan sosialisasi. | - Sosialisasi Perda No. 7 tahun 2003 kepada instansi | - Terlaksananya sosialisasi Perda No. 7 tahun 2003 |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | kab/kota + Propinsi sebanyak 65 orang. - Pembuatan peta RTRWP SU skala 1 : 250 000 sebanyak 44 Blat. - Pembuatan peta RTRWP SU skala 1 : 500 000 sebanyak 22 Blat. - Penggandaan 6 peta tematik skala 1 : 500 000 sebanyak 24 Blat. | tentang RTRWP SU tahun 2003 – 2018 kepada instansi kab/kota dan propinsi sebanyak 65 orang. - 44 Blat. - 22 Blat. - 24 Blat. |
| 3 | Hasil atau Result: Sebagai pedoman dalam perencanaan pemanfaatan. | Perda No. 7 tahun 2003 merupakan pedoman bagi kab/kota dan sektoral se sumatera utara. | Belum sepenuhnya Perda No. 7 tahun 2003 dipedomani oleh kab/kota se sumatera utara. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya. | Perda RTRWP No. 7 tahun 2003 sebagai bahan referensi pemanfaatan ruang oleh kab/kota dan sektoral. | Terdapat peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang sesuai rencana RTRWP SU oleh kab/kota se sumatera utara. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan yang berkualitas. | Semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang sesuai rencana yang ditetapkan 25 kab/kota. | Kab/kota dan sektoral menggunakan RTRWP untuk kepentingan rencana 25 kab/kota. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Daerah.
 2. Sub Bidang : Mempercepat Pembangunan Wilayah.
 3. Program : Penataan Ruang.
 4. Kegiatan : Pembinaan tim koordinasi penataan ruang daerah.
 5. Dana : Rp 249 000 000.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|---|---|---|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: - Dana pembinaan tim koordinasi penataan ruang daerah (TKPRD): a. Tenaga operator dan analisis. b. Tenaga operator komputer. | Rp 249 000 000 - Tim pengarah 16 orang. - Kelompok kerja perencanaan 14 orang. - Kelompok kerja pengendalian 11 orang. - Sekretariat 4 orang. - Tenaga operator dan analisis. - Tenaga operator komputer. | Rp 239 766 825 - Tim pengarah 16 orang. - Kelompok kerja perencanaan 14 orang. - Kelompok kerja pengendalian 11 orang. - Sekretariat 4 orang. - Tenaga operator dan analisis. - Tenaga operator komputer. |
| 2 | Keluaran atau output: - Buku evaluasi RTRWP kab/kota terhadap Perda No. 7 tahun anggaran 2003. - Laporan pelaksanaan kegiatan TKPRD. | - 5 Buku. - Pengadaan 1 unit kamera digital. - 2 Buku. | - 5 Buku. - Pengadaan 1 unit kamera digital. - 2 Buku. |
| 3 | Hasil atau Result: Koordinasi dan evaluasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang. | Kunjungan ke daerah kabupaten pusat dan propinsi. | Kunjungan ke daerah kabupaten pusat dan propinsi. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukan. | - Terdapat peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang sesuai rencana. | Perda RTRWP diupayakan dan digunakan sebagai bahan referensi pemanfaatan ruang oleh kab/kota dan |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | - Bahan evaluasi dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. | sektoral. |
| 5 | Sasaran atau Dampak; Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang koordinasi. | Semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang ditetapkan. | Kab/kota dan sektoral menggunakan RTRWP untuk kepentingan rencana. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Daerah.
2. Sub Bidang : Mempercepat Pembangunan Wilayah.
3. Program : Penataan Ruang.
4. Kegiatan : Rencana kerja pemanfaatan ruang dan penerapan Perda No 7 Tahun 2003.
5. Dana : Rp 145 000 000.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|--|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Dana. | Rp 145 000 000 | Rp 142 338 000 |
| 2 | Keluaran atau output: Pelaksanaan kegiatan sosialisasi. | Sosialisasi Perda No. 7 tahun 2003 kepada instansi kab/kota + propinsi sebanyak 65 orang. Pembuatan peta RTRWP SU skala 1 : 250 000 sebanyak 44 Blat. Pembuatan peta | Terlaksananya sosialisasi Perda No. 7 tahun 2003 tentang RTRWP SU tahun 2003 – 2018 kepada instansi kab/kota dan propinsi sebanyak 65 orang. 44 Blat. |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | RTRWP SU skala 1 : 500 000 sebanyak 22 Blat. Penggandaan 6 peta tematik skala 1 : 500 000 sebanyak 24 Blat. | 22 Blat. 24 Blat. |
| 3 | Hasil atau result: Sebagai pedoman dalam perencanaan pemanfaatan. | Perda No. 7 tahun 2003 merupakan pedoman bagi kab/kota dan sektoral se Sumatera utara. | Belum sepenuhnya Perda No. 7 tahun 2003 dipedomani oleh kab/kota se Sumatera utara. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana peruntukannya. | Terdapat peningkatan kapasitas pemanfaatan ruang sesuai rencana. Bahan evaluasi dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. | Perda RTRWP diupayakan dan digunakan sebagai bahan referensi pemanfaatan ruang oleh kab/kota dan sektoral. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang koordinasi kawasan yang berkualitas. | Semakin rendahnya penyimpangan pemanfaatan ruang sesuai rencana yang ditetapkan. | Kab/kota dan sektoral menggunakan RTRWP untuk kepentingan rencana. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembinaan Daerah.
2. Sub Bidang : Mempercepat pengembangan wilayah.
3. Program : Peningkatan kawasan strategis dan kawasan andalan.
4. Kegiatan : Rencana kerja kegiatan pembinaan pembangunan prasarana perkotaan dari pinjaman ADB sesuai keputusan gubsu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

5. Dana : Rp 249 999 000.

| No | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|----|---|---|---|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Tim koordinasi pembangunan sarana. Pegawai non PNS. | Rp 249 999 000 Tim pengarah 8 orang. Tim teknis 13 orang. Tim koordinasi 20 orang. Pengelola kegiatan 9 orang. Sekretariat 8 orang. Pegawai non PNS 10 orang. | Rp 230 541 500 Tim pengarah 8 orang. Tim teknis 13 orang. Tim koordinasi 20 orang. Pengelola kegiatan 9 orang. Sekretariat 8 orang. Pegawai non PNS 10 orang. |
| 2 | Keluaran atau output: Laporan akhir kegiatan | 2 Buku. | 2 Buku. |
| 3 | Hasil atau Result: Bahan informasi pelaksanaan pembangunan. | Tersedianya data dan informasi tentang pelaksanaan program pembangunan. | Telah tersedia buku informasi tentang pelaksanaan pembinaan pengembangan kawasan andalan. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Mendorong terlaksananya pelaksanaan pembangunan. | Terlaksananya proyek pembangunan. | Proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan pembinaan tim. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan secara keseluruhan. | Terarahnya program kegiatan pembangunan di kabupaten kota. | Belum sepenuhnya kegiatan pengembangan kawasan andalan. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan SDA dan lingkungan hidup.
 2. Sub Bidang : Pembangunan SDA dan lingkungan hidup.
 3. Program : Pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
 4. Kegiatan : Pembinaan hutan dan reboisasi hutan.
 5. Kode Rekening : 2. 01. 06.
 5. Dana : Rp 31 027 375.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|--|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Dana. | Rp 31 027 375 | Rp 26 854 975 |
| 2 | Keluaran atau output: Laporan pembinaan reboisasi hutan dan lahan. | Laporan pembinaan reboisasi hutan dan lahan 2 eksemplar buku. | Laporan pembinaan reboisasi hutan dan lahan 2 eksemplar buku. |
| 3 | Hasil atau result: Mendorong pelaksanaan reboisasi. | Monitoring atau pembinaan ke kabupaten se sumatera utara. | Monitoring atau pembinaan ke kabupaten sumatera utara telah dilaksanakan. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Pemanfaatan dana reboisasi melalui hasil monitoring dan evaluasi. | Dana reboisasi kabupaten digunakan sesuai rencana alokasi yang telah ditetapkan. | Penyerapan dana reboisasi di kabupaten sebahagian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Penggunaan dana reboisasi lebih tepat sasaran. | Dana reboisasi digunakan untuk kegiatan reboisasi hutan dan lahan di kabupaten sumatera utara. | Pemakaian dana reboisasi untuk kabupaten bermanfaat bagi penyelenggaraan kegiatan reboisasi hutan dan lahan sumut. |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Ekonomi.
 2. Program : Kapasitas perencanaan daerah.
 3. Kegiatan : Penyusunan arah dan kebijakan umum (AKU) serta strategi dan prioritas APBD Proprsu tahun anggaran 2005.
 4. Kode Rekening : 01. 06. 01. 13.
 5. Dana : Rp 60 000 000.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|---|---|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Penyusunan arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2005. | Rp 60 000 000 | Rp 55 725 000 |
| 2 | Keluaran atau output: Buku arah dan kebijakan umum serta strategi da prioritas APBD tahun anggaran 2005. | 100 eksemplar. | 100 eksemplar. |
| 3 | Hasil atau result: Tersedianya pedoman bagi unit organisasi perangkat daerah dan tim anggaran eksekutif dan legislatif dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2005 dengan baik dan tepat waktu. | RAPBD tahun anggaran 2005 disusun dengan mempedomani ketentuan yang disepakati dalam AKU. | Dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2005 telah mengacu kepada AKU serta strategi dan prioritas APBD tahun anggaran 2005. |
| 4 | Manfaat atau Benefit; Terlaksananya penyusunan RAPBD tahun anggaran 2005 dengan baik dan tepat waktu. | Kegiatan pembangunan tahun anggaran 2005 terlaksana dengan baik dan tepat waktu. | RAPBD tahun anggaran 2005 disusun dengan baik. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Proses penyusunan RAPBD tahun anggaran 2005 berdasarkan pendekaan kinerja sesuai KepMendagri No. 29 tahun 2002. | Kualitas RAPBD tahun anggaran 2005 lebih transparan dan akuntabel. | Meningkatnya kualitas RAPBD tahun anggaran 2005. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan Ekonomi.
 2. Sub Bidang : Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi.
 3. Program : Pembangunan sarana dan prasarana.
 4. Kegiatan : Rencana kerja kegiatan operasional persiapan pembangunan bandara udara kuala namu dan jalan tol medan – binjai.
 5. Kode Rekening : 01. 06.
 6. Dana : Rp 94 485 450.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|---|--|---|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Rencana kerja kegiatan operasional persiapan pembangunan bandara udara kuala namu dan jalan tol medan – binjai. | Rp 94 485 450 | Rp 69 103 250 (73,13%) |
| 2 | Keluaran atau output: Pembentukan tim. Konsultasi atau koordinasi ke pemerintah pusat. Pertemuan atau rapat dengan instansi terkait. Tersedianya note book. | Keputusan gubernur sumut. 6 orang x 5 hari. Rapat dengan instansi terkait. 1 unit note book. | Keputusan Gubsu. 6 orang x 5 hari. Rapat dengan instansi terkait. 1 unit note book. |
| 3 | Hasil atau result: Terciptanya kesepakatan dalam rangka percepatan pembangunan bandara udara kuala namu dan jalan tol medan – binjai. | Tersedianya data dan informasi untuk penyusunan persiapan pembangunan bandara udara kuala namu dan jalan tol medan – binjai. | Jalan tol medan – binjai sedang dalam proses tender di departemen PU. Persiapan dokumen tender untuk bandara udara kuala namu. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: | Pelaksanaan | Pembangunan |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

| | | | |
|----------|--|---|---|
| | <p>Terwujudnya koordinasi yang baik dalam rangka penyusunan program pelaksanaan kegiatan pembangunan bandara udara kuala namu dan jalan tol medan – binjai.</p> | <p>pembangunan sistem transportasi terutama jaringan jalan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan, ekonomi dan sosial masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.</p> | <p>bandara udara kuala namu dan jalan tol nedan binjai perlu segera direalisasikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di sumut.</p> |
| <p>5</p> | <p>Terselenggaranya pembangunan dan pengelolaan bandara udara kuala namu sebagai pengganti bandara udara polonia dan jalan tol medan binjai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p> | <p>Perencanaan dan program sesuai dengan sistem transportasi menjadi lebih baik dan efisien atau efektif dan terintegrasi antar modal melalui pendekatan wilayah yang mengacu pada dokumen perencanaan dan ketentuan atau peraturan yang berlaku.</p> | <p>Terlaksananya koordinasi perencanaan transportasi dalam rangka terintegrasi atau terpadunya penanganan jalan atau jembatan dengan sektor – sektor lainnya terutama keterkaitannya demi mencapai arus lalu lintas yang aman, nyaman, baik dan lancar guna menunjang perekonomian sosial budaya.</p> |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Administrasi pemerintahan .
 2. Program : Kapasitas perencanaan daerah.
 3. Kegiatan: : Penyusunan draft awal PROPEDA Propinsi Sumatera Utara tahun 2006 – 2010.
 4. Dana : Rp 150 000 000.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|---|---|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Honorarium, biaya jasa pihak ketiga untuk penyusunan draft PROPEDASU (RPJM) dan penggandaan. | Rp 150 000 000 | Rp 149 687 450 |
| 2 | Keluaran atau output: Penyusunan draft PROPEDESU (RPJM) 2006 – 2010. | 75 eksemplar. | 75 eksemplar. |
| 3 | Hasil atau result: Menjadi draft pedoman program atau rencana kerja badan/dinas/kantor dan lembaga lainnya di lingkungan Pempropesu. | Pedoman 45 satuan kerja di Pempropesu untuk menyusun rencana kerja. | Hasil draft PROPEDASU sebagai bahan penyusunan final PROPEDASU (RPJM) sumut 5 tahun. |
| 4 | Manfaat atau result: Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pempropesu. | Terdapatnya peningkatan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pempropesu. | Kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pempropesu terdapat peningkatan dengan wujud lebih baik dan terarah. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Terintegrasinya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sumatera utara. | Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya semakin terintegrasi dan terpadu. | Terselenggaranya pelaksanaan pembangunan di propinsi sumatera utara yang terintegrasi dan terpadu. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2004 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Aparatur Pemerintahan.
2. Program : Kapasitas Perencanaan Daerah.
3. Kegiatan : Forum konsultasi pembangunan propinsi sumut tahun anggaran 2004 (MUSRENBANG).
4. Dana : Rp 450 000 450.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|--|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Honorarium, biaya jasa pihak ketiga, rapat – rapat koordinasi (MUSRENBANG) di kab/kota, MUSRENBANG propinsi, Rakorgub, dan MUSRENBANGNAS. | Rp 450 000 450 | Rp 406 863 450 |
| 2 | Keluaran atau output: Terlaksananya forum konsultasi koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan sumut. | Melaksanakan forum konsultasi koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan sumut. | Terlaksananya forum konsultasi dan musyawarah perencanaan pembangunan sumut. |
| 3 | Hasil atau result: Pedoman dinas atau instansi terkait dalam menyusun perencanaan tahunan. | Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan sumut bagi instansi prop/kab/kota. Tersedianya dokumen usulan program kebersamaan antara wilayah perbatasan propinsi. Tersedianya dokumen usulan | Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan sumut bagi instansi prop/kab/kota. Tersedianya dokumen usulan program kebersamaan antara wilayah perbatasan propinsi. Tersedianya dokumen usulan |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | program atau proyek untuk Sumatera Utara. | program atau proyek untuk Sumatera Utara. |
| 4 | Manfaat atau Benefit: Terpadu dan terintegrasinya perencanaan pembangunan sumut dan wilayah perbatasan Propsi. | Terjadinya perencanaan pembangunan sumut dan wilayah perbatasan propsi yang terpadu dan terintegrasi. | Terjadinya perencanaan pembangunan sumut dan wilayah perbatasan propsi yang terpadu dan terintegrasi. |
| 5 | Sasaran atau Dampak: Pelaksanaan pembangunan yang terpadu, terkoordinasi dan membawa manfaat yang besar bagi propinsi, kabupaten dan kota. | Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumatera Utara dan kebersamaan antar wilayah perbatasan propinsi se Sumatera Utara secara terpadu dan berkesinambungan. | Tersusunnya perencanaan pembangunan Sumatera Utara dan kebersamaan antar wilayah perbatasan propinsi se Sumatera Utara secara terpadu dan berkesinambungan. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2002 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

- 1. Bidang : Pembinaan Daerah.
- 2. Sub Bidang : Mempercepat Pengembangan Wilayah.
- 3. Program : Peningkatan kawasan strategis dan kawasan andalan.
- 4. Kegiatan : Rencana kerja kegiatan akhir pembinaan pembangunan prasarana perkotaan .
- 5. Kode Rekening : 2.01.06.
- 6. Dana : Rp 244 000 000.

| No | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|----|---|--|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Dana | Rp 244 000 000 | Rp 230 541 500 |
| 2 | Keluaran atau output: Laporan akhir kegiatan pembinaan | Laporan rencana kerja kegiatan. Pembinaan | Tersedianya buku laporan pelaksanaan. Pembinaan tentang |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | program. Dua (2) eksemplar buku. | program pembangunan. Dua (2) eksemplar buku. |
| 3 | Hasil atau result: Bahan informasi pelaksanaan program pembangunan. | Tersedianya informasi tentang pelaksanaan program pembangunan di medan, binjai dan deli serdang. | Tersedianya informasi tentang pelaksanaan program pembangunan di medan, binjai dan deli serdang. |
| 4 | Manfaat atau result: Mendorong terlaksananya pelaksanaan pembangunan. | Pembinaan kegiatan pembangunan. | Pembinaan kegiatan pembangunan di medan, binjai dan deli serdang telah dilaksanakan. |
| 5 | Sasaran atau dampak: Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan secara baik. | Terkoordinasinya program kegiatan pembangunan di medan, binjai dan deli serdang. | Belum sempurnanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN APBD PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2003 PADA BAPPEDA PROPINSI SUMUT

1. Bidang : Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup.
2. Sub Bidang : Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup.
3. Program : Reboisasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
4. Kegiatan : Pembinaan Hutan dan Reboisasi hutan.
5. Dana : Rp 30 275 000.

| No. | Ringkasan Narasi | Indikator Kinerja | |
|-----|--|---|--|
| | | Rencana | Realisasi |
| 1 | Masukan atau input: Dana Tim Koordinasi. | Rp 30 275 000 Pengelola kegiatan 5 | Rp 26 854 975 Pengelola kegiatan 5 orang. |

UNIVERSITAS MEDAN AREA

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | orang. | |
| 2 | Keluarar atau output: Laporan pembinaan reboisasi hutan. | 2 Buku. | 2 Buku. |
| 3 | Hasil atau Result: Mendorong pelaksanaan reboisasi. | Dana reboisasi tahun anggaran 2003 digunakan, diserap melalui realisasi penggunaan di kabupaten atau kota. | Dana reboisasi tahun anggaran 2003 digunakan untuk kegiatan reboisasi dan penghijauan hutan. |
| 4 | Manfaat atau benefit: Pemanfaatan dana reboisasi melalui hasil monitoring dan evaluasi. | Dana digunakan untuk monitoring dan himbauan pada kabupaten atau kota. | Untuk dilaksanakan kegiatan pembangunan dan monitoring melalui perjalanan dinas dan rapat. |
| 5 | Sasaran atau dampak: Penggunaan dana lebih tepat sasaran. | Dana reboisasi digunakan untuk kegiatan pembiraaan reboisasi huan dan lahan di kabupaten dan kota sumatera utara. | Pengeluaran dana pembinaan bermanfaat bagi penyelenggaraan kegiatan reboisasi hutan dan lahan di kabupaten dan kota sumatera utara. |

Sumber: BAPPEDA SUMUT MEDAN

E. Analisis Penyimpangan dan Tindak Lanjut

Setelah melakukan perbandingan antara perencanaan awal anggaran dengan realisasi anggaran maka diketahui bahwa telah terjadi kelebihan atau surplus anggaran antara perencanaan awal anggaran dengan realisasi anggaran dimana dalam hal ini realisasi anggaran yang digunakan lebih rendah daripada dana

anggaran yang telah disiapkan atau yang telah direncanakan, hal ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mengindikasikan bahwa proses perencanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan tim anggaran telah melakukan tugasnya dengan baik yaitu dapat memprediksi seberapa besar anggaran yang akan digunakan.

Selisih antara rencana dengan realisasi anggaran dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran, surplus anggaran terjadi apabila rencana anggaran lebih besar dari realisasi anggaran dan defisit anggaran terjadi apabila rencana anggaran lebih kecil dari realisasi anggaran.

Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk Transfer dana cadangan, Pembayaran pokok utang, dan Penyertaan modal atau investasi sedangkan defisit anggaran dibiayai antara lain dari sisa anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan dari hasil penjualan barang milik daerah.

Dalam hal ini surplus atau kelebihan anggaran yang didapat dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran pokok utang, dan Penyertaan modal atau investasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian maupun analisis pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penyusunan dan realisasi anggaran telah dilaksanakan dengan baik:

A. Kesimpulan

1. BAPPEDA SUMUT telah menggunakan anggaran sebagai alat perencanaan pembangunan dan ditempuh dengan berbagai tahap proses perencanaan pembangunan antara lain dengan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan dan juga membuat rencana anggaran satuan kerja.
2. BAPPEDA SUMUT di dalam menyusun rencana pembangunan melalui anggaran telah menerapkan prosedur yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan dan peran serta setiap bagian dalam struktur organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing, hal ini akan memberikan tanggung jawab dan motivasi yang lebih tinggi dari setiap bagian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing – masing.
3. Aktivitas penyusunan anggaran berjalan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dan ketersediaan indikator kinerja kegiatan anggaran memberikan masukan terhadap pengukuran dan perbandingan anggaran.

4. Pengawasan anggaran dilakukan melalui analisis perbandingan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya.

Namun dalam hal ini masih terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian yaitu:

1. Perencanaan anggaran masih harus memerlukan analisis yang lebih kritis mengenai prioritas penggunaan anggaran untuk pembangunan.
2. Penyusunan anggaran sebaiknya dilakukan secara objektif dan transparan.
3. Penyimpangan terhadap anggaran sebaiknya diminimalisasikan.

B. Saran

Dengan selesainya penulis mengambil kesimpulan dan saran maka ada baiknya penulis mencoba untuk memberikan saran - saran yang menurut penulis dapat membantu BAPPEDA SUMUT dalam meningkatkan pelaksanaan perencanaan dan realisasi anggaran daerah yaitu:

1. Pihak penyusun anggaran harus memiliki antisipasi yang kuat dan akurat tentang perkiraan anggaran untuk menghindari penyimpangan pada anggaran.
2. Setiap bagian dalam struktur organisasi harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik guna keberhasilan pembangunan.
3. Tingkat ketepatan dan keakuratan anggaran harus ditingkatkan sehingga penyimpangan karena ketidaktepatan penyusunan anggaran yang objektif dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA isasikan bahkan dapat dihindarkan.

4. Melakukan analisis yang lebih kritis terhadap penyimpangan anggaran yang menguntungkan dan yang jumlahnya cukup signifikan dan meminta pertanggungjawaban dari setiap bagian struktur organisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya masing – masing.
5. Kepada setiap bagian dalam struktur organisasi agar tetap dapat mempertahankan keharmonisan hubungan kerja dan terus meningkatkan disiplin kerja serta menjaga komitmen dan semangat kerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Arthur J Keown, David F Scott Jr, John D Martin, J William Petty, **Financial Mangement - Dasar – Dasar Manajemen Keuangan**, Terjemahan Chaerul D Djakman, Edisi Ketujuh, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Bambang Riyanto, **Dasar – Dasar Pembelanjaan Perusahaan**, Edisi Keempat, Cetakan Pertama, BPFE – Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Gatot Soepriyanto, Indra Bastian, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Buku Kesatu, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- Husein Umar, **Studi Kelayakan Bisnis**, Edisi Kedua, Cetakan Keenam, PT SUN, Jakarta, 2003.
- Indra Bastian, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Buku Kedua, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- M. Nafarin, **Penganggaran Perusahaan**, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Mulyadi, **Akuntansi Manajemen**, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Salemba Empat Jakarta, 2001.
- T. Hani Handoko, **Manajemen**, Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE, Yogyakarta, 1998.
- Tulus Tambunan, **Perekonomian Indonesia**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- R. Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Pertama, CV. ALFABETA, Bandung, 1999.
- S. Nasution, M. Thomas, **Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.**

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, **Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)29/2/24